

	News Title : Gelar Konsultasi Publik, Mendag Zulhas: Indonesia Segera Luncurkan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka	
	Media Name : Inilah.com	Journalist : Ikhsan Suryakusumah
	Publish Date : 05 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Ekspor Sawit

Gelar Konsultasi Publik, Mendag Zulhas: Indonesia Segera Luncurkan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka

Semn, 05 Jun 2023 - 13:02 WIB
Penulis: Ikhsan Suryakusumah



Daftar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berbicara dalam acara konsultasi publik.

Kementerian Perdagangan terus berkomitmen meningkatkan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah, *crude palm oil* (CPO), serta mendorong pembentukan harga acuan CPO yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Hal ini untuk memastikan harga, menghargai maupun petani kelapa sawit. Upaya dilakukan Kementerian Perdagangan dengan menginisiasi kebijakan ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam acara konsultasi publik "Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia" di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Acara ini dihadiri pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan perwakilan lembaga pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI).

"Ekspor CPO melalui bursa berjangka yang ditargetkan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO. Indonesia ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia," kata Mendag Zulhas.

Ia mengungkapkan, saat ini ekspor masih surplus meskipun tidak terlalu besar karena kondisi perekonomian global yang sedang melemah. Untuk itu, perlunya inovasi-inovasi seperti pengalihan perdagangan dari pasar tradisional ke nontradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Hal ini diperlukan karena masih banyak aturan-aturan yang mempersulit ekspor seperti adanya kebijakan sertifikasi di Eropa dan Amerika.

Baca juga: [Survei Tuntutan Jajasi Masih Tertarik, PNI Semu](#)
Penulis: Damar

"Selain pengalihan pasar dari tradisional ke nontradisional, perlu juga memperkuat kebijakan ekspor Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan ekspor CPO karena CPO merupakan salah satu penyumbang surplus neraca perdagangan," lanjut Mendag Zulhas.

Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, sudah selangkah Indonesia memiliki harga acuan untuk CPO sendiri. Namun, kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia.

Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisk Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDO) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

"Berlaku dengan kebijakan tersebut diperlukan berbagai masukan agar ekspor CPO melalui bursa tidak menganiaya pelaku usaha CPO. Proses bisnis yang ada sekarang tidak banyak berubah kecuali kewajiban ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kebijakan kewajiban pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga ekspor tetap wajib memiliki HE terlebih dahulu. Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung ketertarikan pengaturan ekspor CPO melalui bursa berjangka ini," tandas Mendag Zulhas.

Baca juga: [Resensi Kemendag Soal Produk MI Instan Indonesia](#)
Dititik di Taiwan-Malaysia



Sementara itu, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan, ekspor melalui bursa berjangka komoditas ini hanya akan mengacu CPO dengan HS 1511 1000 dan tidak termasuk produk turunannya. Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE). HE diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan atau memiliki HE yang diperoleh dari pihak yang mengizinkan HE atau pemenuhan DMO. Bursa CPO akan memiliki harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kita ingin memastikan untuk ekspor CPO melalui bursa berjangka. Secara umum, Bappebti telah mengkoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan. Selain itu, Kemendag telah menggelar konsultasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait," terang Didid.

Ia melanjutkan, dalam prosesi nanti, akan ada tiga tahap kebijakan yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia; peraturan Bappebti yang akan mengatur ketentuan teknis antara lain kelembagaan, mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, serta Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

Baca juga: [Jelang Pesta dan Lebaran, Penyusutan Minyak](#)
Moral

"Diharapkan masukan pelaku usaha sektor sawit agar kebijakan tersebut dapat terlaksana, terutama pada masa transisi. Kemendag akan memastikan ekspor CPO melalui bursa dapat berjalan secara efektif," imbuh Didid.

Nantinya, masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor CPO tersebut dicarangkan selama 60 hari untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan bursa CPO.

Masa transisi ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan ekspor CPO di Indonesia serta memperlancar implementasi kebijakan.